

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015, agenda baru untuk pembangunan berkelanjutan resmi diadopsi oleh negara-negara anggota PBB. Program ini memberikan pedoman untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang dan planet yang kita tinggali. Agenda yang dikenal dengan SDGs tersebut memiliki 17 target yang melibatkan seluruh aktor internasional, baik negara maju maupun berkembang, untuk bekerja sama. Salah satu pihak yang terlibat dalam mewujudkan SDGs adalah UNESCO. UNESCO merupakan agensi PBB yang berupaya untuk membangun perdamaian melalui kerja sama internasional di sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan.

Salah satu program kerja UNESCO yang terkenal adalah UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) diluncurkan pada 2004 dan ditujukan untuk mengokohkan kerja sama antarkota yang telah mengenali kreativitas sebagai unsur strategis pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Lebih lanjut dengan bergabung ke dalam jaringan kota kreatif UNESCO, para anggota juga harus berkomitmen untuk mendukung kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan *press release* UCCN, Kota Kreatif muncul sebagai pusat eksperimen yang mengarah pada model

pembangunan berkelanjutan yang inovatif dan sukses (International Institute for Sustainable Development, 2019).

Pekalongan adalah suatu wilayah pesisir di utara Pulau Jawa yang juga tersohor dengan julukan Kota Batik. Julukan ini tersemat karena pilar ekonomi utama kota ini bertumpu pada produksi kerajinan batiknya. Pada 2014 lalu, Pekalongan berhasil masuk menjadi salah satu anggota *Creative Cities Network* dan menjadi wakil pertama dari Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam jaringan tersebut (CNN Indonesia, 2015). Pelestarian dan pengembangan kerajinan batik menjadi salah satu prioritas bagi orang-orang di Pekalongan. Salah satu upaya pelestarian ini adalah dengan mendirikan Museum Batik yang kini telah diakui sebagai “Praktik Perlindungan Warisan takbenda Terbaik”. Pekalongan, mengutip dari *website* resmi UNESCO, dikenal memiliki contoh yang baik berkaitan dengan bagaimana pembangunan berbasis budaya dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan kegiatan yang meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup mereka. Sebagai kota yang terletak di kawasan pesisir Pulau Jawa, Pekalongan memiliki sumber daya alam yang terbatas. Hal ini membuat kegiatan ekonomi bergantung pada kreativitas masyarakat. Batik sebagai warisan budaya terus berkembang sebagai penunjang budaya dan perekonomian Pekalongan (UNESCO, 2018b). Berkat perkembangan industri dan batiknya, Pekalongan diakui UNESCO sebagai Kota Kreatif versi *Cities of Crafts and Folk Art*.

Saat ini batik di Pekalongan sudah berkembang dengan pesat hingga disebut sebagai pilar ekonomi di kota tersebut. Namun demikian, perkembangan batik di Kota Pekalongan mulai mengundang perhatian khalayak umum terkait dengan peran batik sebagai elemen inti dalam pembangunan berkelanjutan sesuai mandat dari UCCN itu sendiri. Hal ini disebabkan karena batik diketahui seperti pisau bermata ganda yang mana meskipun baik secara ekonomi ia juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan (BBC, 2021). Dengan bergabungnya Pekalongan ke dalam Kota Kreatif dunia versi UNESCO, Pemerintah Kota Pekalongan berarti harus berkomitmen dalam mengembangkan budaya membatik, di saat yang sama ia harus memastikan perkembangan batik tidak mengganggu elemen-elemen keberlanjutan sehingga dapat mewujudkan poin-poin SDGs. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan sebagai anggota jaringan kota kreatif UNESCO akan memadukan batik sebagai unsur inti untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui budaya batik Pekalongan?
2. Bagaimana perilaku Pemerintah Kota Pekalongan terhadap kerjasama UCCN dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs)?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum:

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran berbagai aktor baik internasional maupun nasional dalam menjalankan mandat dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

1.3.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran dan kontribusi budaya pembatik dalam mencapai tujuan dalam SDGs di Kota Pekalongan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan melalui batik mewujudkan SDGs berdasarkan *Framework UCCN*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dengan memberi informasi lebih dalam berkaitan dengan kualitas hidup para pembatik di Kota Kreatif Pekalongan dan menjabarkan proses perwujudan nilai-nilai SDGs seperti kesetaraan gender,

pendidikan bermutu, dan sebagainya dapat dicapai melalui industri kreatif, khususnya Batik Pekalongan, lewat paparan-paparan yang diberikan.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana nilai-nilai dalam budaya dapat membantu dalam mewujudkan agenda kerjasama internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian telah menjelaskan bagaimana pentingnya memahami SDGs dan cara mengimplementasikannya. Biermann et al. (2017) mengatakan untuk mencapai tujuan SDGs harus melampaui dari sekedar cara tradisional, seperti bergantung pada laporan nasional saja. Kesuksesan implementasi SDGs membutuhkan kolaborasi yang efektif dari pemerintah global dan nasional itu sendiri. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa agenda internasional ini tidak bisa dicapai dengan upaya dari negara itu sendiri sehingga memerlukan integrasi dari pemerintah global, regional, nasional, dan lokal. Beberapa negara mungkin harus mengatur ulang susunan administrasi nasional dan sistem pemerintahannya untuk mewujudkan agenda ini. Jelasnya, pembangunan berkelanjutan harus mengakui kompleksitas tata kelola global, yang tidak hanya terdiri dari sistem negara berdaulat, tetapi juga jaringan ilmuwan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil yang berinteraksi satu sama lain, serta konteks lingkungan yang menjadi dasar tata kelola global.

Lewat National Voluntary Review (VNR) yang dikeluarkan Bappenas, Indonesia ikut serta dalam melaporkan progress SDGs di tingkat nasional dan sub-nasional, yang dipimpin oleh negara dan didorong oleh negara. Beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Agussalim et al. (2019) mengklaim bahwa walaupun Indonesia telah menghasilkan VNR yang membahas upaya teknokratisnya untuk mengimplementasikan SDGs, tidak jelas apakah kerangka pembangunan Indonesia yang lebih luas di tingkat nasional atau subnasional mendukung upaya ini. Jokowi telah mengedepankan narasi negara-sentris yang didasarkan pada maksimalisasi penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dari VNR tersebut tampak bahwa developmentalisme baru Jokowi memberikan pembangunan berkelanjutan sebagai peran yang kurang sentral, menjadikannya prioritas kedua setelah kemajuan infrastruktur dan stabilitas politik. Selain itu, VNR Indonesia juga mengungkapkan kurangnya metode koordinasi multi-level antara tingkat pemerintahan nasional dan subnasional (pemerintah daerah), serta kurangnya partisipasi dalam proses implementasi, mengingat sifat teknokratis dari implementasi SDGs di Indonesia.

Hal senada juga disebutkan Zaki Arianto (2018). Menurut Arianto di era pemerintah Joko Widodo, Indonesia masih memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendah dalam mencapai tujuan SDGs baik dari masyarakat atau pun lembaga pemerintahan itu sendiri yang mana membuat pelaksanaan agenda kerjasama internasional ini masih tampak seperti berjalan di tempat saja. Adapun salah satu faktor

tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah berkenaan dengan implementasi SDGs dalam lingkup masyarakat sehingga hal ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi berbagai aktor termasuk masyarakat dalam perwujudan tujuan SDGs yang sudah diintegrasikan dalam rencana pembangunan negara.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan dalam SDGs diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah dari tingkat negara, regional, hingga daerah. Aktor-aktor seperti organisasi internasional hingga masyarakat sipil juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong perwujudan agenda internasional ini. Dalam penelitian ini penulis secara khusus berfokus untuk mengetahui lebih jauh berkaitan dengan perwujudan SDGs di Indonesia salah satunya melalui konsep Kota Kreatif yang diprakarsai oleh UNESCO sebagai salah satu organisasi internasional.

Deborah Stevenson (2020) dalam tulisannya mengklaim bahwa sampai saat ini masih sedikit perhatian yang tercurah pada UNESCO Creative Cities Networks (UCCN). Kurangnya minat ini terjadi lantaran inisiatif UCCN ini tidak memiliki status *'high profile'* di beberapa kawasan, sebut saja di kawasan belahan utara, meskipun banyak kota di kawasan tersebut yang masuk ke dalam jaringan kota kreatif. Selain itu, ketidakpopuleran konsep UCCN juga disebabkan karena para anggota datang dengan sedikit atau bahkan tanpa sumber daya dari UNESCO itu sendiri. Dalam tulisannya, Stevenson menekankan tantangan terbesar dalam memadukan tujuan SDGs dan *framework* UCCN adalah tantangan mengartikan tentang apa yang keberlanjutan dapat

dan seharusnya bermakna bagi para anggota jaringan kota kreatif agar dapat mendukung dan menunjukkan kreativitas serta industri kreatif, dan untuk menarik wisatawan.

Salah satu kota yang menjadi anggota UCCN dari Indonesia adalah Pekalongan. Bukan rahasia umum jika mengatakan bahwa Pekalongan ini terkenal sebagai daerah dengan produksi batiknya yang melimpah di Indonesia. Sayangnya, meskipun membuka kesempatan bagi perekonomian di sana, industri batik yang berkembang semakin besar ini bagai pisau bermata dua. Hal ini berkaitan dengan konsep keberlanjutan yang ada dalam industri batik. Kusumawati et al (2021) menjelaskan bagaimana batik menjadi pisau bermata dua dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Batik berkontribusi besar dengan meningkatkan peluang dan kemampuan ekonomi masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun di balik sisi tersebut, perkembangan industri batik juga dibarengi dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah batik (Budiyanto et al., 2018; Siregar et al., 2020). Dengan demikian, dalam perkembangan industrinya perlu adanya solusi untuk membuat bagaimana industri batik dapat benar-benar menjadi industri yang berkelanjutan dengan menggerakkan produksi batik ramah lingkungan menggunakan pewarna alami (Kusumawati et al., 2021).

Menimbang berbagai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam tulisan ini penulis berfokus pada pembahasan bagaimana implementasi SDGs di Indonesia dapat dilakukan oleh aktor domestik yaitu Pemerintah Kota dan masyarakat

sipil menggunakan budaya batik dengan melokalisasikan SDGs melalui *framework* kota kreatif UNESCO yang sebelumnya dianggap kurang populer. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana kerangka kota kreatif UNESCO dapat membuat industri kreatif batik di Pekalongan harus menyesuaikan konsep keberlanjutan yang menjadi akar dalam *framework* UCCN untuk mencapai SDGs.

Framework UCCN kurang lebih berisi visi kolektif dari seluruh Jaringan UCCN, yang dibagikan oleh UNESCO dan kota-kota anggota UCCN, dan membawa pesan global tentang cara-cara di mana budaya dan kreativitas dapat melayani pembangunan kota. Adapun visi kolektif tersebut diantara: 1) mendefinisikan UCCN sebagai program kerja UNESCO untuk menuju kota yang berkelanjutan dan menjadi sumber berbagai inovasi pada kebijakan perkotaan yang terkait dengan budaya; 2) menjadikan agenda pembangunan internasional 2030 sebagai peluang untuk menjadikan budaya sebagai kunci dalam mencapainya dan memberikan peran lebih pada pemerintah daerah untuk menjadi sumber inovasi dari kebijakan perkotaan yang berkelanjutan; 3) menyatukan tujuan para member dengan menampilkan kekuatan inovatif kota-kota anggota pada platform internasional, mengelola pertumbuhan jaringan yang baik, meningkatkan keterwakilan geografis jaringan, memastikan keberlanjutan finansial; 4) menyatukan tujuan untuk masa depan dengan memastikan semua anggota melakukan berbagai aktivitas seperti bertukar pengalaman dalam mengembangkan kota berkelanjutan melalui pedoman, strategi, dan instrumen operasional tentang kebijakan perkotaan yang terkait dengan budaya, dan proyek

percontohan; 5) dimensi dari mekanisme tata kelola hingga pertumbuhan dan pendanaan

Untuk melihat bagaimana framework tersebut dilaksanakan khususnya di bagian di mana sebuah kota harus berkomitmen pada tujuan menjadikan budaya sebagai kendaraan dalam mencapai SDGs, penulis menggunakan konsep budaya batik, pembangunan berkelanjutan, dan teori kepatuhan yang memberikan panduan dalam menjawab rumusan masalah.

1.5.1 Budaya Batik

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada satu budaya khusus, yaitu budaya membatik. Batik menurut Nik Krevitsky (1964:7) adalah sebuah teknik menggambar pola pada kain dengan cara menutupi sebagian pola menggunakan lilin malam dan mewarnai bagian yang tidak ditutupi lilin malam. UNESCO mendefinisikan Batik Indonesia sebagai sebuah teknik, simbolisme, dan budaya yang melingkupi kain dan sutra yang diwarnai dengan tangan (UNESCO, 2009a).

Di banyak literatur, batik di Indonesia dipengaruhi geografis yang membuat batik berkembang mengitisi tradisi di tempatnya berkembang. Secara umum, Batik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Batik Pedalaman dan Batik Pesisiran (Elliott, 1984; Stephenson, 1993; Tirta, 2009). Adapun batik Pekalongan merupakan salah satu batik yang berkembang di wilayah pesisir, di mana batik di wilayah ini berkembang dengan bebas dan bervariasi, baik dari motif maupun warnanya. Batik di daerah pesisir

kebanyakan dikembangkan untuk tujuan utama komersial sehingga tradisi dan simbolisme dijadikan kepentingan sekunder (Stephenson, 1993:110). Tanpa adanya aturan dari kerajaan yang mengikat, batik di daerah pesisir memperlihatkan gaya “seni rakyat” dan menunjukkan bagaimana pengrajin batik berekspresi mengikuti selera para pembeli. Dengan demikian, Batik Pekalongan dapat didefinisikan sebagai hasil kerajinan dan kesenian yang berasal dari proses menutupi bagian di atas kain malam menggunakan lilin malam dan mewarnai bagian lainnya menggunakan pewarna, di mana hal tersebut dikembangkan untuk tujuan utama komersial daripada dikembangkan untuk sekedar memenuhi tradisi dan simbolisme.

1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan internasional merupakan salah satu pemikiran yang sering dibahas dalam studi hubungan internasional. Pemikiran ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bukti yang beragam di dunia berkaitan dengan hubungan kesejahteraan manusia dengan masalah pola umum yang muncul ketika membandingkan orang, kelompok sosial, bangsa, sistem ekonomi dan politik, serta wilayah dunia. Sementara istilah pembangunan internasional umumnya digunakan untuk memberi gambaran tentang orang, tempat, dan proses dalam pembangunan internasional yang mana mencerminkan evolusi pemikiran tentang kemiskinan, kekayaan, dan hubungan antarbangsa (Haslam et al., 2017:5). Salah satu konsep yang berkembang dalam studi ini adalah konsep *sustainable development*. Konsep kemudian dileburkan dalam tujuan pembangunan internasional dewasa ini yang telah tersusun dalam beberapa agenda

kerja sama pembangunan internasional, salah satunya adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas oleh komunitas internasional lewat perantara PBB pada tahun 2015.

Konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep berakar dari pemikiran para ahli ekonomi yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kelangsungan lingkungan. Konsep ini mulai populer sejak *World Commission on Environment and Development* (WCED) (1987) menyusun laporan bertajuk “*Our Common Future*” yang membahas mengenai perkembangan manusia. Dalam laporan tersebut tertulis sebuah konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan dan diartikan dengan pembangunan yang dapat mencukupi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di masa kini tanpa mengorbankan dan mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan di masa depan. Pemenuhan kebutuhan serta aspirasi manusia ialah ambisi utama dari pembangunan berkelanjutan. Seiring bergantinya waktu, beberapa definisi mengenai pembangunan berkelanjutan juga ikut berkembang. Todaro dan Smith (2015:493) mendefinisikannya dengan pola pembangunan yang memungkinkan generasi masa depan untuk hidup selayaknya generasi masa sekarang dengan cara melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Sementara itu, menurut Robert Goodland (1995:4) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menempatkan pertumbuhan ekonomi di luar kapasitas lingkungan dan dilakukan dengan berkelanjutan secara sosial. Dengan kata lain, Goodland mendefinisikan

pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akar dari pemikiran konsep ini berasal dari pandangan bahwa di bumi ini masih banyak orang-orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan esensial mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan pekerjaan. Sementara itu, setiap orang sudah sepatutnya memiliki hak untuk meningkat kehidupan mereka. Adanya pembangunan berkelanjutan akan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar semua orang untuk memenuhi hak dan memperluas kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang menjadi lebih baik. Untuk mencapai hal ini tentu saja dibutuhkan faktor pendorong seperti pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan biasanya cenderung mengubah dan merusak ekosistem lingkungan. Adanya pembangunan berkelanjutan mengharuskan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan untuk melindungi keselamatan ekosistem secara penuh. Intinya, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses perubahan di mana pemanfaatan sumber daya alam, arah investasi, klah perkembangan teknologi, hingga perubahan institusional semuanya selaras dengan tujuan untuk memajukan potensi untuk masa sekarang maupun masa depan guna mencukupi kebutuhan dan aspirasi manusia (WCED, 1987).

Secara keseluruhan, tujuan yang ingin dicapai oleh konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan definisi yang telah disebutkan dapat diwujudkan dengan mengintergrasikan tiga pilar, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan,

dan keberlanjutan sosial (Goodland, 1995:4). Keberlanjutan ekonomi berfokus pada sumber daya yang menjadi input fisik proses produksi sehingga dari pilar ekonomi keberlanjutan dapat dilihat dari proses “pemeliharaan” modal. Dengan kata lain, keberlanjutan ekonomi mensyaratkan sistem produksi yang memenuhi tingkat konsumsi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Selanjutnya, keberlanjutan sosial berfokus pada mengatasi masalah kemiskinan serta perkembangan manusia (Khalili, 2011:7-8). Terakhir, keberlanjutan lingkungan menekankan pada pelestarian lingkungan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial dengan memelihara sistem pendukung kehidupan (Goodland, 1995:3).

Pemikiran pembangunan berkelanjutan inilah yang kemudian menjadi inti dari beberapa agenda kerja sama pembangunan internasional, seperti Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs), SDGs mengembangkan tiga pilar tersebut dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan 169 target yang ingin dicapai, diantaranya adalah (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia; (4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua; (7) Memastikan

akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara; (11) Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level; (17) Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai agenda ini, SDGs melibatkan kerja sama secara global dari seluruh aktor internasional, baik dari negara maju maupun negara berkembang, aktor negara maupun aktor non-negara; organisasi internasional; dan masyarakat sipil (United Nations, 2015). Dengan demikian, diperlukan komitmen besar dari para aktor untuk menjalankan kerjasama ini.

1.5.3 Teori Kepatuhan

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis perilaku aktor, Pemerintah Kota Pekalongan, dalam mematuhi dua bentuk kerjasama internasional yakni SDGs serta UCCN. Kerjasama dalam tulisan ini diartikan dengan keadaan di mana aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan keinginan aktor lainnya melalui melalui proses koordinasi kebijakan (Lindblom, 1965:227). Dengan demikian, kerjasama akan terjadi apabila hasil koordinasi kebijakan tersebut benar-benar dijalankan oleh para aktornya sehingga kepentingan mereka dapat dicapai. Dalam hal ini, kepatuhan menjadi kunci apakah kerjasama tersebut akan bentuk.

Kepatuhan dalam tulisan ini merujuk pada beberapa definisi yang ada. Pertama adalah definisi kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell (1996:5) yaitu sebuah tindakan aktor yang sesuai dengan aturan perjanjian yang dibuat. Adapun Oran R. Young (Young, 1979:172), mendefinisikan kepatuhan sebagai tindakan yang terjadi ketika perilaku subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual menyimpang secara signifikan dari perilaku yang ditentukan. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan merupakan tindakan yang terjadi apabila seorang aktor taat dalam berperilaku sesuai dengan aturan yang ada sementara seorang aktor dikatakan tidak patuh apabila ia menyimpang dan melanggar dari aturan yang ada.

Sementara itu, untuk mengidentifikasi kepatuhan suatu aktor, Mitchell (2007:896-897) memberikan tiga indikator untuk dapat menilai kepatuhan tersebut. Adapun indikator tersebut adalah output, outcome, dan impact.

Output (luaran) dapat berupa hukum, kebijakan, dan regulasi yang suatu aktor adopsi untuk mengimplementasikan perjanjian luar negeri berupa hukum internasional ke dalam hukum domestiknya. Sementara, *Outcome* (hasil) adalah bagaimana perubahan perilaku aktor muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan internasional tersebut. Kemudian *Impact* (dampak) digunakan untuk melihat kualitas yang ditimbulkan dari implementasi perjanjian yang disepakati melalui bukti-bukti yang ada di lapangan

Indikator kepatuhan tersebut nantinya akan digunakan untuk melihat sejauh mana Kota Pekalongan telah menjalankan komitmennya sebagai anggota jaringan kota kreatif (UCCN). Kemudian, indikator ini juga dapat menilai upaya apa saja yang telah dilakukan Pekalongan sebagai anggota UCCN dalam mewujudkan poin-poin pembangunan berkelanjutan. Adanya indikator kepatuhan juga dapat diunakan untuk memperkirakan perilaku Pemerintah Kota Pekalongan dalam menaati sebuah kerjasama internasional.

Sebelum menentukan perilakunya terhadap suatu perjanjian internasional, seorang aktor pasti nimbang beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang kemudian akan membantu aktor dalam menentukan sikapnya, apakah ia akan mematuhi perjanjian dalam kerjasama yang ada atau memilih untuk tidak mematuhinya. Menurut Abram

Chayes and Antonia Handler Chayes (1993:178-187) terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan suatu negara yaitu: efisiensi, kepentingan, dan norma.

Efisiensi diartikan dengan mengambil keputusan untuk melakukan komitmen bukanlah sesuatu tanpa harga, aktor pasti harus mempertimbangkan sumber daya guna menganalisis kebijakan dan pengambilan keputusan yang mahal dan persediaannya yang terbatas. Oleh karena itu, jika perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari pada manfaat yang didapat, tingkat kepatuhan aktor mungkin saja semakin kecil.

Adapun kepentingan didasari dari prinsip paling penting dari hukum internasional adalah bahwa negara tidak dapat terikat secara hukum tanpa persetujuan mereka sendiri. Dengan kata lain, negara tidak perlu membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya.

Adanya perjanjian pada dasarnya dibuat untuk diakui kekuatannya yang mengikat secara hukum sehingga aktor menerima bahwa mereka diwajibkan untuk tunduk di bawah hukum yang ada. Pada akhirnya, aktor beroperasi di bawah rasa kewajiban untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma yang mengatur.

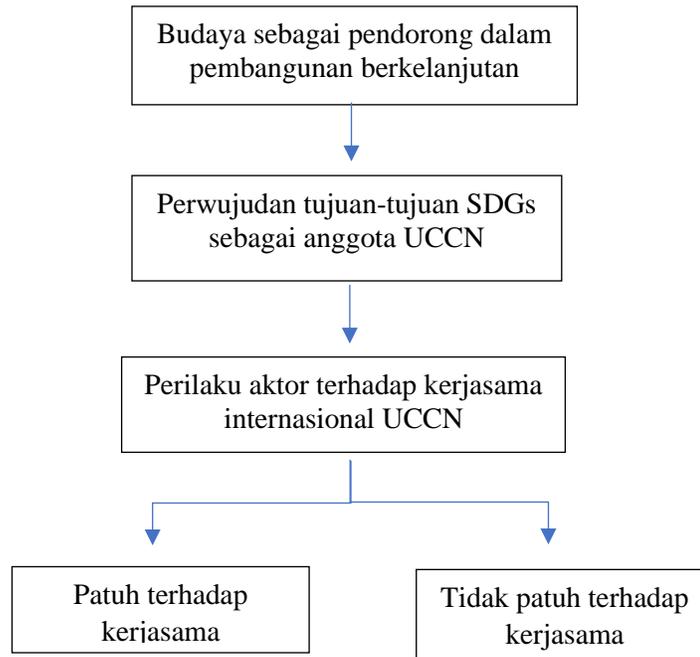
Setelah menimbang berbagai faktor dan indikator kepatuhan yang telah disebutkan, perilaku aktor terhadap suatu kerjasama internasional dapat ditentukan. Sesuai dengan definisi yang sudah disebutkan, suatu aktor dapat disebut patuh dengan suatu perjanjian/kerjasama apabila memiliki perilaku yang mencerminkan aturan dan tujuan yang disepakati dalam perjanjian/kerjasama yang ada. Sebaliknya, aktor akan

disebut tidak patuh apabila melanggar atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian/kerjasama.

Dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah, penulis menggunakan konsep kebudayaan dan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjelaskan keterkaitan budaya terhadap ketiga pilar keberlanjutan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan SDGs. Adapun teori kepatuhan dipakai untuk melihat bagaimana perilaku aktor, dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pekalongan, dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota UCCN. Pemerintah Kota Pekalongan dianggap patuh apabila menjalankan aturan yang disepakati dalam UCCN. Adapun untuk melihat patuh atau tidaknya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota UCCN akan dianalisis melalui tiga indikator kepatuhan yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran dan analisis dalam penelitian ini, penulis menyajikannya ke dalam alur skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema alur pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konsep Budaya

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada satu budaya khusus, yaitu budaya membatik yang merujuk pada definisi Batik Nik Krevitsky (1964:7) serta pengertian batik secara resmi yang dikeluarkan UNESCO pada tahun 2009. Adapun Batik yang dibahas secara khusus adalah hasil kerajinan dari teknik menggambar di atas kain menggunakan kain malam dan mewarnainya menggunakan pewarna yang berkembang

di daerah pesisiran, yaitu Kota Pekalongan, yang dikembangkan untuk keperluan komersil seperti yang didefinisikan oleh Stephenson (1993: 110).

1.6.1.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Penulis merujuk pada definisi dari WCED (1987). Di mana konsep pembangunan keberlanjutan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana budaya membuat dapat mencukupi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di masa kini tanpa mengorbankan dan mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan melalui budaya membuat dilihat melalui mengintegrasikan tiga pilar, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial (Khalili, 2011; United Nations, 2015; WCED, 1987).

1.6.1.3 Teori Kepatuhan

kepatuhan menurut Ronald B. Mitchell (1996:5) adalah sebuah tindakan aktor yang sesuai dengan aturan perjanjian yang dibuat. Adapun Oran R. Young (1979:172), mendefinisikan kepatuhan sebagai tindakan yang terjadi ketika perilaku subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual menyimpang secara signifikan dari aturan yang ditentukan.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Konsep Batik Pekalongan

Penelitian ini akan berfokus pada kerajinanin batik yang mengakar dari budaya yang berkembang di Kota Pekalongan untuk melihat bagaimana pembangunan berbasis budaya dapat mencapai tujuan-tujuan dalam agenda kerjasama internasional.

1.6.2.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah upaya yang dicapai Pemerintah Kota Pekalongan sebagai anggota UCCN sudah mengintegrasikan tiga pilar keberlanjutan yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menciptakan Kota berbasis budaya yang berkelanjutan.

1.6.2.3 Teori Kepatuhan

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan definisi kepatuhan dari Ronald B. Mitchell dan Oran R. Young untuk mendefinisikan bagaimana perilaku Pemerintah Kota Pekalongan sebagai anggota UCCN dalam menjalankan mandat UCCN dan menjelaskan indikator berupa *output*, *outcome*, dan *impact* yang dicapai Pekalongan selama menjadi anggota UCCN.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen utama penulis dalam penelitian ini dibangun dari analisis Bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan SDGs di Kota Pekalongan menurut *Framework* UCCN dan perilaku Pemerintah Kota Pekalongan terhadap kerjasama UCCN melalui budaya batik Pekalongan konsep budaya, pembangunan berkelanjutan, dan teori kepatuhan.

Adapun argumen utama untuk rumusan masalah pertama adalah Pemerintah Kota Pekalongan mendorong berkembangnya potensi-potensi dalam budaya membatik di Kota Pekalongan untuk membangun perekonomian yang dapat menggerakkan pilar sosial dan lingkungan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam mencapai target SDGs menurut *Framework* UCCN. Dalam hal ini, budaya berperan sebagai elemen pendorong dari tiga pilar keberlanjutan, ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai agenda 2030.

Kemudian, argumen utama untuk rumusan masalah kedua adalah dengan menjadikan budaya sebagai inti dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan berarti berperilaku sesuai dengan peraturan dan mandat UCCN dalam menjadikan kota kreatif sebagai sarana mencapai agenda 2030 sesuai mandat UCCN.

1.8 Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan kualitatif dapat diartikan dengan sebuah model penelitian yang mengungkap suatu kejadian di tempat asalnya yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan ke tingkat yang detail melalui keterlibatan tinggi dalam pengalaman aktual/nyata (Creswell, 2008:175-176). Dalam pendekatan ini terdapat penekanan pada proses atau bagaimana fenomena terjadi dan berfokus pada tingkah laku, kepercayaan, dan pemikiran—bagaimana orang-orang memahami pengalaman mereka saat mereka menafsirkan dunia (Koh & Owen, 2000:219-220).

1.8.1 Tipe Penelitian

Dengan kata lain, penelitian kualitatif berjenis deskriptif berusaha untuk mengumpulkan berbagai sumber data lalu akan diolah dan dianalisis untuk menjelaskan hubungan antara fenomena, situasi, dan peristiwa yang terjadi. Tipe penelitian deskriptif tidak menjelaskan atau memastikan hubungan antara variable independen dan dependen tetapi bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang relatif baru atau hanya perlu dideskripsikan (Thomlison, 2001:131-132).

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution (2003: 43) merupakan tempat atau lokasi penelitian dilakukan yang menggambarkan situasi sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, suatu wilayah pesisir yang teletak di utara Pulau Jawa, yang juga

dikenal dengan sebutan kota Batik dan Kota Kreatif versi UNESCO dalam kategori *Crafts and Folk Arts*.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (1990: 116) merupakan batasan terhadap benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Adapun subjek penelitian ini meliputi budaya membatik yang mengakar di Kota Pekalongan, konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda kerja sama Internasional, *UNESCO Creative City Network* yang merupakan program kerja UNESCO, dan Pemerintah Kota Pekalongan sebagai aktor yang menjalankan kerjasama internasional.

1.8.4 Jenis Data

Data penelitian kualitatif dapat berupa kata, kalimat, gambar hingga skema. Data tidak lebih dari potongan-potongan biasa dari informasi yang ditemukan di lingkungan. Data bisa konkret dan terukur, seperti dalam kehadiran di kelas, atau tidak terlihat dan sulit diukur, seperti dalam perasaan (Alexander et al., 2005: 85). Penelitian ini menggunakan jenis data yang berisi data dalam bentuk teks deksriptif berbentuk kata-kata tertulis yang menggambarkan isu serta menjelaskan fenomena sosial yang diteliti seperti konsep kebudayaan, gender, perbedaan kelas sosial, dan sebagainya.

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada tahun 2014 di mana Kota Pekalongan resmi masuk ke dalam jaringan kota kreatif UNESCO hingga tahun 2021.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah data yang berasal secara langsung dari subjek penelitian atau secara khusus dikumpulkan oleh peneliti asli demi tujuan penelitiannya. Sementara itu, data sekunder didapat secara tidak langsung atau didapat lewat perantara selain peneliti. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung oleh tokoh dan instansi terkait (O'Reilly & Kiyimba, 2015: 130). Adapun dalam menemukan sumber data sekunder, penulis menggunakan jurnal dari penelitian sebelumnya, laporan resmi dari instansi terkait, artikel dari portal berita, hingga buku dengan pembahasan yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode utama pengumpulan data atau alat ukur adalah observasi, kuesioner, skala, penggunaan data sekunder (data yang sudah dikumpulkan), wawancara, log, dan jurnal (Thomlison, 2001: 137). Penulis memakai beberapa teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literature, seperti buku, koran, jurnal, laporan, hasil seminar, dan sebagainya. Sementara wawancara dilaksanakan

dengan bertatap muka, baik secara langsung atau pun daring untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber terkait dengan topik penelitian.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Proses menganalisis data melibatkan tahapan memahami berbagai data yang telah dikumpulkan, termasuk menyiapkan data untuk dianalisis, bergerak lebih dalam untuk memahami data, menerangkan data, dan membuat interpretasi dari sebagian besar maksud data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *content analysis* atau dalam Bahasa Indonesia disebut analisis isi. Teknik ini didefinisikan sebagai teknik analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat ditiru dan valid dari teks (atau materi lain yang bermakna) ke pokok permasalahan penelitian. Teknik analisis ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru, meningkatkan pemahaman peneliti terhadap suatu fenomena tertentu, atau memberikan informasi terkait dengan tindakan praktis (Krippendorff, 2004). Dengan menggunakan teknik *content analysis*, peneliti dapat menaksir dan menganalisis keberadaan, makna, dan keterkaitan kata, tema, atau konsep tertentu. Setelah itu, penulis juga menggunakan teknik analisis data induktif di mana penulis membangun pola, kategori, dan tema penelitian dari bawah ke atas (secara *bottom up*), dengan menyusun data menjadi unit informasi yang semakin umum. Teknik ini menggambarkan bagaimana penulis bekerja bolak-balik, dari tema ke database, sampai peneliti telah memastikan seperangkat tema yang komprehensif (Creswell, 2008).

1.8.9 Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari landasan atau desain penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, situs penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, jangkauan penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan terkait dengan pengertian UNESCO Creative Cities Network, komitmen UCCN terhadap SDGs, perwujudan kota kreatif di tingkat internasional dan nasional, serta sejarah kota pekalongan menjadi kota dunia.

BAB III berisi analisis perilaku Kota Pekalongan sebagai anggota UCCN terhadap mandat yang sudah disepakati sebagai anggota UCCN serta menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah Kota Pekalongan dapat mewujudkan poin-poin pembangunan berkelanjutan melalui budaya batik sesuai dengan *framework* UCCN.

BAB IV akan memberikan kesimpulan, saran penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang terkait. Di samping itu, bab ini juga akan memuat temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis.